

PERANAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PADA PT
PLN(PERSERO) UNIT INDUK PENYALURAN DAN PUSAT
PENGATUR BEBAN SUMATERA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PALEMBANG

Yunita

*PT PLN(Persero) Unit Induk Penyaluran Dan Pusat Pengatur Beban Sumatera Unit
Pelaksana Teknis Palembang
yunitasarbina552@gmail.com*

Abstract

Companies that are able to compete and have good performance can be realized by implementing good corporate governance which can be seen from one of the important goals in establishing a company, namely to improve the welfare of all elements of the company, including employees. This is because good corporate governance can encourage the formation of clean, transparent and professional management work patterns. The method used in this research is a qualitative research method by collecting data through observation, interviews, literature study and documentation. Application of Good Corporate Governance Principles in Efforts to Improve Performance at PT PLN (Persero) Main Distribution Unit and Load Control Center Sumatra Palembang Technical Implementation Unit Palembang In interviews with informants, information was obtained that the principle of Openness or Transparency still has several weaknesses, where to Decision making itself is carried out in a busy manner so that there are many ideas and suggestions which make decision making slower than usual and also the impact on the community is the lack of transparency in providing information regarding blackouts so that people who use this service are very disturbed. Then there is still not optimal communication between employees in the division. , this causes several communication misses at work which causes performance to decrease slightly, then there are still employees who are late, indicating that the employee still does not have the responsibilities which are regulated in the provisions of Good Corporate Government, this makes the Good Government process not run smoothly. Good.

Keywords: Good Corporate Governance, Performance

Abstrak

Perusahaan yang mampu bersaing dan mempunyai kinerja yang baik dapat diwujudkan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang terlihat dari salah satu tujuan penting dalam didirikannya suatu perusahaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen perusahaan termasuk karyawan. Sebab, tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi dan Pusat Pengendalian Beban Unit Pelaksana Teknis Sumatera Palembang Palembang Dalam wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa prinsip Keterbukaan atau Transparansi masih memiliki beberapa kelemahan, dimana pengambilan keputusan sendiri dilakukan secara sibuk sehingga banyak timbul ide dan saran yang membuat pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dari biasanya dan juga dampaknya bagi masyarakat adalah tidak adanya transparansi dalam memberikan informasi mengenai pemadaman listrik sehingga masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut pelayanan sangat terganggu. Kemudian masih belum optimalnya komunikasi antar pegawai di divisi tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa kali terjadi miss komunikasi dalam pekerjaan yang menyebabkan kinerja sedikit menurun, kemudian masih terdapat pegawai yang terlambat hal ini menandakan bahwa pegawai tersebut masih

.....

belum mempunyai tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan Good Corporate Governance, hal ini menjadikan Good Government proses tidak berjalan lancar. Bagus.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Kinerja

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan satu satunya perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran tenaga listrik ke seluruh Indonesia, yaitu PLN. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu kunci perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, dan untuk memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang sedang berkembang.

Penerapan prinsip GCG pada PT. PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang dapat dilihat melalui prinsip Transparansi dimana PT. PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang memiliki website publik yang dapat diakses oleh siapa pun, penyampaian informasi mengenai kinerja organisasi seperti lingkungan organisasi, visi misi dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Keterbukaan informasi perusahaan dapat dilihat pada situs www.pln.co.id sehingga siapa saja bisa melihatnya. Transparansi merupakan syarat utama dalam rangka perolehan dan penggunaan informasi yang diperlukan agar bisa dilakukan koordinasi yang efisien. Tranparansi ini berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai kinerja perusahaan secara tepat waktu dan akurat. Transparansi ini ditunjukkan dengan pengungkapan informasi financial dan non financial.

PT PLN (Persero) secara resmi menerapkan GCG pada tahun 2003 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN KEP-117 / M-MBU /(Keputusan Menteri, 2002) yang meliputi penerapan praktik- praktik GCG di

BUMN dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN. PT PLN (Persero) menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik saat ini tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban, tetapi juga telah menjadi syarat yang diperlukan dalam menjalankan bisnis perusahaan untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan, dan untuk upaya perusahaan. , dan untuk perusahaan Upaya yang dilakukan untuk bertahan dalam persaingan.

Berdasarkan observasi di PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang ditemukan permasalahan yaitu: permasalahannya masih banyak karyawan yang belum mematuhi dan menerapkan prinsip - prinsip GCG, sehingga proses bisnis maupun kegiatan di perusahaan masih banyak yg tidak transparan, tidak terdata dengan baik dalam penerapan CGC Khususnya di PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang masih menemukan Beberapa Kendala.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu, Bagaimanakah Penerapan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pada PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari Proposal Penelitian ini

adalah Untuk mengetahui Penerapan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pada PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat manfaat bagi penulis, bagi instansi yang diteliti maupun bagi pembaca lainnya, manfaat lainnya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, Sebagai informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan maka melalui Penelitian ini, penerapan Good Corporate Governance di PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang .

2. Bagi Kantor PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan- masukan dan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan semangat kerja

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213). Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi.

Implementasi adalah hal penting untuk mewujudkan suatu gagasan. Seseorang harus mengimplementasikan gagasan untuk mencapai tujuannya. Implementasi adalah proses yang diterapkan di berbagai bidang tanpa batasan apa pun mulai dari bidang pendidikan, sosial, politik, teknologi, kesehatan, informasi dan banyak lainnya.

Menurut Tachjan (2014 : 26) menjelaskan tentang unsur - unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada , yaitu :

- a. Pelaksana unsur
- b. Adanya program yang dilaksanakan serta

Kelompok sasaran atau kelompok sasaran.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- masalah publik (Moento et al., 2019). Dalam konsep *governance*, pemerintahannya menjadi salahsatu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas.

Hubungan *Good Corporate Governance* dengan *Governance* yaitu

Konsep "*Good Governance*(tata kelola pemerintahan yang baik)" hakikatnya menunjukkan suatu perbedaan secara signifikan antara berbagai kelompok perilaku dalam pemerintahan sedangkan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundang undangan.

Penerapan *good corporate governance* (GCG) perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparant

Good Corporate Governance

Menurut (Mangkusuryo & Jati, 2017) Istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Terdapat banyak definisi terkait dengan luas sesuai dengan kepentingan institusi, penulis, Negara, dan tradisi yang menggunakan istilah tersebut. IFC mendefinisikan *Corporate*

Governance sebagai sebuah struktur dan proses dalam menentukan arah dan pengawasan terhadap perusahaan.

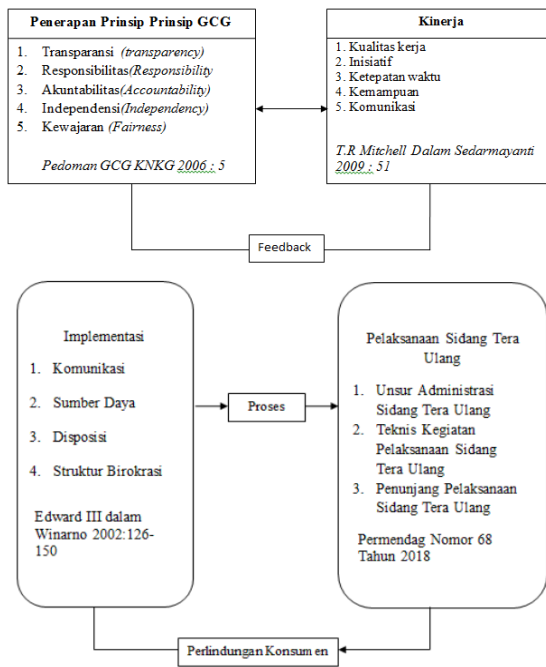
Good corporate governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang- undangan dan etika berusaha. Sedangkan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan dasar dari proses dan mekanisme manajemen perusahaan berdasarkan hukum, peraturan dan etika bisnis, sedangkan *Good Corporate Governance* yang baik Menurut Adrian (Novrianti & Armas, 2012) sistem dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan serta menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham (benar) untuk memperoleh informasi secara benar dan hak memperoleh informasi secara tepat waktu, dan kedua, perusahaan berkewajiban untuk mengungkapkan seluruh informasi tentang kinerja perusahaan dalam suatu akurat, tepat waktu dan transparan kepemilikan dan *stakeholder*. Melalui praktik GCG, dengan senantiasa memusatkan perhatian pada tujuan perusahaan dan memperhatikan kepentingan stakeholders secara seimbang diharapkan pengelolaan sumber daya perusahaan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan efisien. (Pedoman GCG PLN). Dari berbagai definisi yang ditemukan, menurut Respati dan Yusniar (Novrianti & Armas,2012) definisi GCG adalah menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan adalah:

- 1.Struktur model hubungan harmonis komite regulator, direksi, RUPS dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Sistem check and balances

meliputi pembatasan keseimbangan kekuasaan pada Pengendalian perusahaan Hal ini dapat membatasi munculnya dua peluang: salah urus dan penyalahgunaan aset perusahaan, dan

3. Proses yang transparan untuk menentukan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Kerangka Fikir



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metodologi penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) yang digunakan oleh suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara- cara masuk akal. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamatinya. Sistematis berarti

proses yang dilakukan itu dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis Definisi konsep dalam penelitian ini ada Penerapan Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance* adalah serangkaian

kegiatan yang meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang- orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance*.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi.

Defenisi Operasional

Menurut Sugiyono (2015 : 38) defenisi operasional yaitu suatu petunjuk pelaksana bagaimana caranya mengukur suatu variable. Untuk memperjelas penelitian yang akan dilakukan penulis, Untuk lebih jelasnya penulis memberikan penjabaran defenisi operasional dapat dilihat pada table 2.

**Tabel
Defenisi
Operasional**

No	Konsep	Indikator
1.	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> <i>Pedoman Umum GCG Indonesia KNKG 2006</i>	1. Transparansi (<i>transparency</i>) 2. Akuntabilitas(<i>Accountability</i>) 3. Responsibilitas(<i>Responsibility</i>) 4. Independensi(<i>Independency</i>) 5. Kesetaraan dan Kewajaran (<i>Fairness</i>)
2.	Kinerja <i>T.R Mitchell Dalam Sedarmayanti 2009</i> 51	1. Kualitas kerja 2. Inisiatif 3. Ketepatan waktu 4. Kemampuan 5. Komunikasi

Menurut sugiono dalam bukunya tahun 2009 halaman 221, dalam menentukan informan, penentunnya sangat berpengaruh agar informasi yang diterima akurat. Suyanto berpendapat bahwa ada beberapa jenis informan penelitian:

1. Informan kunci
Adalah informan yang memberikan informasi yang jelas dan valid
2. Informan utama
Adalah informan yang harusnya ada kaitannya dengan konsep yang akan diteliti

Informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Informan Penelitian

N	NAMA INFORMAN	JUMLAH
1.	Asisten Manager Keuanga & Umum	1Orang
2.	Sekretaris Administrasi	1 Orang
3	Staff Karyawan	3 Orang
Jumlah		5 Orang

Ada beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yaitu antara lain wawancara,

focus group discussion, dan obsersasi. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dan dilakukan secara mendalam antara peneliti dan narasumber unutk memperoleh mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukam tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data . Analisa data terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang terjadi secara bersamaan, sebagai berikut :

1. Reduksi Data
Menurut Sugiyono (2018:247-249)

reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

2. Penyajian data
Penyajian data dikenal juga dengan mekanisasi yang dipergunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan rangkaian angka numerik (penomoratan) agar mudah dibaca. Sehingga secara umumnya, data-data penelitian tersebut dapat disajikan kepada khalayak umum dengan sangat mudah. hal ini juga dijalankan oleh peneliti, sehingga nantinya diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Yuni (2011), penyajian data adalah rangakain kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan guna mempermudah data- data yang telah dikumpulkan

3. Penarikan kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018:252-253), penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal. Tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Sedangkan menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh . Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas.

Palembang, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian terkait Penerapan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja yang akan dijelaskan data dari hasil penelitian tersebut, yaitu:

Penerapan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance Pada PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang

A. Prinsip Prinsip Good Corporate Governance

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia saat ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012. Landasan hukum ini memberi arahan jelas bagaimana BUMN menerapkan prinsip- prinsip GCG dalam praktik

bisnis sehari- hari. Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER/01/MBU/2011 diatas bukan merupakan payung hukum baru terkait GCG. Sebelumnya aturan main tentang GCG sudah pernah ada atau setidaknya diupayakan kearah ini. Regulasi itu antara lain Surat Keputusan Nomor: KEP-117/M-MBU/(Keputusan Menteri, 2002) tentang Penerapan Good Corporate Governance di perusahaan BUMN. GCG mulai diterapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus merupakan pedoman bagi komisaris dan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Selain itu perusahaan juga disadarkan kembali akan tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya bertumpu pada pihak internal saja, melainkan terhadap stakeholder dan juga masyarakat sekitar, mengingat orientasi perusahaan di masa mendatang sudah menjadi stakeholder oriented dimana dalam aktivitas ekonominya perusahaan juga memperhatikan bagaimana masyarakat sekitar (termasuk pelanggan), pemerintah, serta lingkungan bisnisnya. Oleh karena itu, perusahaan menetapkan kebijakan untuk menerapkan prinsip- prinsip yang terkandung dalam GCG. Penerapan kpnsep gcg diharapkan dapat menjadi pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pihak yang berkepentingan. Penerapan GCG membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dari penetapan kebijakan dasar tata tertib yang harus dianut oleh top management dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada di dalamnya. Secara berkelanjutan dan

.....

konsisten perusahaan melaksanakan GCG dengan komitmen dari visi misi yang telah dibuat sebelumnya. Perusahaan berupaya untuk menjunjung tinggi kepercayaan public dengan menerapkan prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, *fairness*. Hal itu Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) Pedoman *Good Corporate Governance* Tahun 2006 Halaman 5 Yakni Prinsipnya sebagai berikut

Prinsip Keterbukaan (*transparency*).

Prinsip ini merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam hal prinsip keterbukaan di PT. PLN (Persero) UIP3B UPT Palembang sudah terlaksana dengan baik jika diperhatikan dari pengembangan sistemnya sudah memadai dengan baik, dan pelaporannya penulis lihat telah disampaikan secara berkala. Namun masih ada beberapa kelemahan dalam prinsip ini, dimana untuk pengambilan keputusan sendiri dilakukan secara ramai sehingga banyak ide dan saran yang membuat pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dari biasanya. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan mengenai organisasi. Dimana pengungkapan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas merupakan hal yang penting, sehingga semua pihak yang berkemungkinan pada PT. PLN (Persero) UIP3B UPT Palembang tahu pasti apa yang telah dan bisa terjadi.

2. Akuntabilitas

(*accountability*) Penerapan *good corporate governance* dalam hal prinsip akuntabilitas di PT. PLN (Persero) UIP3B UPT Palembang, menggunakan Badan

Pemriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit laporan keuangan tahunan. Hal ini dimaksudkan agar segala laporan maupun kegiatan yang dijalankan pada PT. PLN (Persero) UIP3B UPT Palembang sesuai dengan peraturan dan hukum yang ditetapkan sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam menjalankan tugasnya terutama oleh para karyawan. Jadi, dengan adanya akuntabilitas tersebut pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara efektif. Penerapan dari prinsip akuntabilitas dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada PT PLN (Persero) UIP3B UPT Palembang adalah pembagian tanggung jawab dan kewajiban yang jelas dari berbagai departemen perusahaan, dan tidak ada konflik dalam tanggung jawab masing-masing bidang. Keputusan menetapkan pembagian tanggung jawab dan wewenang, yang dapat dilihat pada struktur organisasi perusahaan. PT PLN (Persero) menerapkan prinsip akuntabilitas dengan menerbitkan "*Board Manual*", "*Code of Conduct*" dan "*Code of Good Corporate Governance*", yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban instansi perusahaan. Perusahaan mendorong setiap orang untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Sejak tahun 2004 PT PLN (Persero) secara intensif melaksanakan program sertifikasi Bidang Pembangkitan yang meliputi ISO

14001 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, SMK3, Kelaikan Operasi, Sertifikasi Kompetensi Operasi dan Pemeliharaan. Sasaran yang hendak dicapai adalah setiap Pusat Tenaga Listrik (Pembangkit) harus dikelola dengan mengikuti standar internasional yang dibuktikan Sistem Manajemen Mutu melalui

program sertifikasi diyakini akan membuat akuntabilitas kegiatan operasional meningkat, sehingga tingkat kepercayaan para kreditor dan para pemangku kepentingan lain terhadap PLN membaik.

Prinsip tanggung jawab (responsibility). Prinsip ini merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. penerapan *good corporate governance* dalam hal prinsip responsibilitas di PT. PLN (Persero) UIP3B UPT Palembang, karyawan dituntut untuk dapat menyampaikan informasi bersifat cepat dan tepat waktu, menyajikan laporan tentang kinerja secara rutin, dan menyediakan media khusus untuk menerimanya keluhan konsumen. PT PLN(Persero) UIP3B UPT Palembang dalam menjalankan tugasnya bersifat objektif untuk mengambil keputusan, dimana PT.PLN (Persero) UIP3B UPT Palembang menjunjung tinggi prinsip dan mekanisme perusahaan yang sehat. PT PLN (Persero) UIP3B UPT Palembang menerapkan dengan ketat kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam *Code of Conduct* sebagai acuan dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan. *Code of Conduct* berisi kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN. Petunjuk ini mengatur mengenai aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota, dan hubungan dengan pihak eksternal. Guna memenuhi pelaksanaan independensinya.

Kemandirian (independency) prinsip ini merupakan keadaan dimana kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Penerapan *good corporate governance* dalam hal prinsip kemandirian (independency) di PT. PLN (Persero) UIP3B UPT Palembang, tersebut dalam menjalankan tugas berdasarkan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku, dalam pengambilan segala keputusan selalu bersikap objektif, dan PT. PLN selalu menjunjung tinggi prinsip kemandirian dan mekanisme instansi yang sehat.

Prinsip GCG pada BUMN yang terakhir ialah kewajaran (fairness). Prinsip ini merupakan kadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Kesetaraan (fairness) di PT.PLN (Persero) UIP3B UPT Palembang tersebut diterapkan system keadilan, dimana hal tersebut dapat dilihat dari hak pegawai yang diberikan secara proporsional, pegawai memiliki kesempatan berpartisipasi yang adil dan terdapat mekanisme reward, serta adanya penegakan peraturan pada semua karyawan yang harus dipatuhi oleh karyawan tersebut. Pada prinsip ini, dalam memenuhi hak hak pegawai terkadang masih mengalami keterlambatan dari biasanya, dan juga ada beberapa penegakan aturan yang masih tidak dilakukan dengan baik, sehingga mekanisme reward sulit di gunakan. Dalam proses penerimaan karyawan PT PLN (Persero) UIP3B UPT Palembang telah memberikan pengumuman melalui website perusahaan untuk tenaga kerja

berpengalaman maupun *fresh graduate*. Setiap karyawan diberikan hak untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya melalui pendidikan dengan bantuan dana dari perusahaan maupun tanpa bantuan dari perusahaan.

Kelima prinsip GCG pada BUMN tersebut di rancang dalam keputusan menteri dan harus dapat diarahkan pada pengelolaan BUMN yang lebih kompetitif. Kepercayaan pihak asing maupun domestic menjadi prioritas untuk dipulihkan kembali setelah keterpurukan sector usaha yang terjadi di Indonesia akibat krisis yang terjadi ditahun 1997-1998. Pemulihan kepercayaan ini hanya bias dilakukan melalui pembenahan kredibilitas internal dalam tubuh BUMN secara konsisten dan berkelanjutan.

Namun, Saat Penelitian sedang berlangsung, Peneliti Mendapatkan beberapa temuan bahwa dalam prinsip Tanggung jawab atau Responsibility, Masih banyak pegawai yang masih belum paham akan tanggung jawabnya dalam bekerja, masih adanya pegawai yang terlambat menunjukkan bahwa pegawai itu masi belum memiliki tanggung jawab yang mana diatur dalam ketentuan Good Corporate Government, hal ini membuat proses Good Government tidak berjalan dengan baik.

Penerapan prinsip GCG pada BUMN memiliki tujuan. Tujuan ini dapat dilihat dalam pasal 4 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Adapun tujuannya adalah : 1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memilik daya saing yang

kuat, baik di lingkup nasional maupun internasional sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, efisien, efektif, dan serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ persero/ organ perum.

3. Mendorong agar organ persero/organ perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.

Dengan kata lain, Penerapan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance Pada PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang Sudah Berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Kinerja Pada PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang

Kinerja Pegawai dari individu tenaga kerja, yaitu kemampuan mereka, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan dan hubungan mereka dengan organisasi kinerja pegawai pada PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang adalah para pegawai yang ada pada PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang ada juga beberapa faktor yang harus diperhatikan agar dapat menunjang kinerja pegawai yaitu. Kemampuan fisik pegawai tergantung pada kesehatan tubuh yang dimiliki, jika pegawai memiliki kesehatan tubuh yang terpelihara maka

.....

setiap pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan baik. Maka untuk mengatasi hal ini, perlunya perhatian pimpinan secara lebih terhadap kondisi pegawainya serta mengenai sarana kesehatan yang diberikan baik berupa makanan dan fasilitas lainnya harus diperhatikan. Fasilitas yang menyenangkan

dapat meningkatkan kinerja pegawai untuk tetap dapat aktif datang ke kantor tepat pada waktu yang ditentukan.

Fasilitas yang nyaman ini dapat dilakukan dengan cara pemberian ruang kerja yang nyaman dan alat kantor yang diberitahukan para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sekali-kali pegawai dirapatkan dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi di PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang, mengajak setiap pegawai untuk rapat mencari solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi, sehingga pegawai juga merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Hal ini dapat meningkatkan kinerja pegawai agar lebih maksimal. Memperhatikan kebutuhan religius Pemberian kesempatan untuk melaksanakan aktifitas religius (sholat) juga dapat meningkatkan rasa senang dan nyaman pegawai terhadap pimpinan sehingga akan menimbulkan rasa senang dalam bekerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Sekali-kali pegawai perlu suasana santai. Suasana santai diperlukan untuk menghindari rasa bosan dan tegang bagi pegawai karena mempengaruhi pekerjaan dan hasilnya. Penilaian kinerja adalah proses evaluasi prestasi kerja petugas yang dilakukan oleh pimpinan secara sistematis berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Penilaian kinerja bila

diberlakukan secara tepat dan adil dapat menjadi suatu pengalaman yang menimbulkan semangat bagi semua orang yang terlibat. dalam meningkatkan kinerja serta memelihara iklim kondusif dan dalam meningkatkan kinerja pegawai harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu kualitas pegawai.

Lalu faktor pemberian Remunerasi juga akan meningkatkan kinerja, Maka jika terjadi Peningkatan Kinerja, Maka meningkat pula program *Good Corporate Governance* yang dijalankan PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang Tersebut, Berdasarkan Wawancara yang telah dilakukansebelumnya yakni Adanya komunikasi membuat anggota suatu tim atau perusahaan bebas mengutarakan pendapatnya. Tidak hanya itu, mereka juga bisa berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang krusial untuk kemajuan bisnis, maka Tujuan Perusahaan dapat lebih mudah untuk dicapai, maka dari itu, Program *Good Corporate Governance* Sangat Berpengaruh Untuk meningkatkan Kinerja pada PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Palembang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Penerapan Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran Dan Pusat Pengatur Beban Sumatera Unit Pelaksana Teknis Palembang Palembang Dalam wawancara dengan Informan, didapatkan informasi dimana pada prinsip Keterbukaan atau *Transparency* masih ada beberapa kelemahan, dimana

.....

untuk pengambilan keputusan sendiri dilakukan secara ramai sehingga banyak ide dan saran yang membuat pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dari biasanya dan juga dampak kepada masyarakat kurangnya transparency dalam pemberian informasi mengenai pemadaman sehingga masyarakat yang menggunakan layanan ini sangat terganggu, Kemudian Masih belum maksimalnya Komunikasi antar pegawai dalam divisi, hal itu membuat adanya beberapa Miss komunikasi dalam bekerja yang membuat kinerja menjadi sedikit menurun, lalu masih adanya pegawai yang terlambat menunjukkan bahwa pegawai itu masi belum memiliki tanggung jawab yang mana diatur dalam ketentuan Good Corporate Government, hal ini membuat proses Good Government tidak berjalan dengan baik..

DAFTAR PUSTAKA

Darmadi , 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Hasibuan, Malayu S.P (2007), *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Hasibuan, Malayu S.P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu S.P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi. Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.

LexyJ. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung

Mathis. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai*. PT. Bumi Aksara Buana : Jakarta
 Mudjiarahardjo, Triangulasi dalam penelitian Kualitatif (online), (<http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi->

dalam-penelitian-kualitatif.html (Diakses 15 Juli 2023)

Mulyadi, Dedy, 2016, *Kebijakan Publik*, Bandung Nasir, 2012, *Perspektif Metode Penelitian*, Penerbit Rieneka Cipta, Jakarta

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, . Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

W.J.S Poewadarmita,(1996) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wahyuni, (2013) *Kegiatanpenelilitian.n*Yogjakarta: PT. Media Pressindo.

Widjaja, (2006), *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali.
 Winarno,Budi, (2014), *Kebijakan Publik*, Yogyakarta

Zain, Badudu, (1996) *Kamus Umum Bahasa Indoensia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.